



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- **CV AZKA KARUNIA JAYA**, diwakili oleh Siti Nurosidah bertempat tinggal di Perum Dim Gg. 7 RT 007, RW 004 Kel. Jubung Kec. Sukorambi, Kab. Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn., dan Zainur Ratna Savitri, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember-Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 184/Pendaft/pdt/2023 tanggal 3 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- **Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember**. Tempat kedudukan Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 - **Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19**. Tempat kedudukan Jalan Danau Toba Nomor 16 Kel Tegal Gede, Kec Sumbersari, Kab Jember – Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
 - **Pemerintahan Kabupaten Jember cq Kepala Daerah Bupati Jember**. Tempat kedudukan Jalan Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 29/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tertanggal 3 Mei 2023 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV. AZKA KARUNIA JAYA yang didirikan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris SITI LESTARININGSIH, S.H. No. 41 tanggal 10 Januari 2018, yang beralamat di Perum Muktisari Este Blok BB 124 Kel. Kranjingan, Kab. Jember – Jawa Timur;
2. Bahwa, Perusahaan Penggugat bergerak di bidang *general contractor* dan *supplier* yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Bahwa, Pada tahun 2020, Bupati Jember yang menjabat saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/438.2/1.12/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 tentang Rencana Kebutuhan Belanja untuk Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel), serta telah dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19, yang kemudian instansi tersebut mengeluarkan surat – surat dan kontrak dengan Perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (washtafel), salah satunya adalah perusahaan Penggugat. Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember, sebagai TERGUGAT I dan Pejabat Pembuat Komitmen Covid – 19 sebagai TERGUGAT II dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa, pada tahun 2021, telah dilantik Bupati Jember yang baru dan menjabat hingga saat ini. Salah satu tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah *“memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) butir d UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah juga berwenang untuk “*menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama*”.

Bahwa, oleh sebab itu, Bupati Jember yang menjabat saat ini secara *ex officio* bertanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut, karena masih dianggap sah berlaku sampai saat ini. Hal tersebut berkesesuaian dengan *asas Presumptio Iustae Causa* yang berarti semua keputusan Tata usaha negara dianggap sah, berlaku dan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa, Bupati Jember dalam forum “*Q & A Masyarakat Bertanya, Bupati Menjawab*” telah memberikan pernyataan bahwa Pemerintah memberi kesempatan kepada Perusahaan yang menjalankan pekerjaan wastafel untuk melakukan klaim keuangan melalui mekanisme APH (Aparat Penegak hukum) atau putusan pengadilan. Dengan demikian, Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menarik Bupati Jember sebagai TERGUGAT III dalam perkara *a quo*.

5. Bahwa, terhadap Surat Keputusan sebagaimana posita nomor 2, perusahaan Penggugat, menerima penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel).
6. Bahwa PENGGUGAT akan menjelaskan terhadap pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :
 - Berdasarkan surat Nomor : 027/08.R.5/SPMPBJ/35.09.416 /VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020. Perihal Surat Perintah Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) TK Klaster Selatan 50 di lokasi Play Group Asy-Syihabiyah, Pos Paud Anggur 16, Pos Paud Anggur 19, Pos Paud Anggur 25, Pos Paud Anggur 29, Pos Paud Anggur 52, Pos Paud Anggur 64, Pos Paud Anggur 76.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Nomor : 027/08.R.6/ SPPBJ/35.09.416 /VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020. Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa mengenai pekerjaan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) TK Klaster Selatan 50 di lokasi Play Group Asy-Syihabiyah, Pos Paud Anggur 16, Pos Paud Anggur 19, Pos Paud Anggur 25, Pos Paud Anggur 29, Pos Paud Anggur 52, Pos Paud Anggur 64, Pos Paud Anggur 76.

Bahwa, terhadap pelaksanaan pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan (wastafel) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut diatas, perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :
Perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.209.552.500 (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Bahwa, terhadap seluruh perkiraan biaya yang terdapat dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) tersebut, ditandatangani oleh TERGUGAT II.

- 7. Bahwa, terhadap paket pekerjaan tersebut, TERGUGAT II telah mengeluarkan Surat Pesanan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :
Surat Pesanan Nomor : 027/1769.G/SP/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020. dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2020 dengan perkiraan biaya Rp. 203.869.000 (Dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031092680 atas nama CV. AZKA KARUNIA JAYA (SITI NUROSIDAH).

- 8. Bahwa, TERGUGAT II mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :
Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Nomor : 027/1769.G.1/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2020 dengan perkiraan biaya Rp. 203.869.000 (Dua ratus tiga juta

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer ke Bank Jatim Jember No Rekening 0031092680 atas nama CV. AZKA KARUNIA JAYA (SITI NUROSIDAH).

9. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan bertanggungjawab, namun dikarenakan adanya penambahan maupun perubahan item pekerjaan di lokasi pekerjaan dan cuaca yang tidak mendukung sehingga memotong jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka CV. AZKA KARUNIA JAYA mengajukan surat permohonan perpanjangan kontrak kerja, selanjutnya terbilah surat sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :

- Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/12.R.23 /ADD-SP.A/35.09.416/XII/2020. Yang dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 28 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/12.R.24/ADD-SPMK.A/35.09.416 /XI/2020. Yang dimana dalam hal isi surat tersebut perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 28 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- Addendum Surat Pesanan (ADD - SP) Nomor : 027/12.R.25/ADD-SP/35.09.416/XII/2020. Yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 17 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
- Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/12.R.1.1/ADD-SPMK /35.09.416/XII/2020. Yang dimana dalam hal isi surat tersebut persetujuan perubahan volume dan harga tertanggal 17 Desember 2020 yang telah ditanda tangani oleh TERGUGAT II.

10. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan semua pekerjaan dengan baik sehingga terbitlah surat yang dibuat oleh TERGUGAT II yaitu sebagai berikut :

a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor :
027/12.R.22/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember
2020. Yang dimana dalam isi surat tersebut adalah *"menyatakan
dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan Terhadap
penyerahan hasil pekerjaan belanja pengadaan bak cuci tangan TK
Klaster Selatan 50 di lokasi Play Group Asy-Syihabiyah, Pos Paud
Anggur 16, Pos Paud Anggur 19, Pos Paud Anggur 25, Pos Paud
Anggur 29, Pos Paud Anggur 52, Pos Paud Anggur 64, Pos Paud
Anggur 76 yang dilaksanakan oleh CV. AZKA KARUNIA JAYA
dengan jumlah harga Rp.209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta
lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)"*.

11. Bahwa, telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I serta
Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember (TERGUGAT II) terhadap penyerahan hasil pekerjaan
belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel) yang dilaksanakan oleh
PENGUGAT berdasarkan :

- a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :

Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.R.1.2/BAST
/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta
lampirannya sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta
lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

12. Bahwa, dikarenakan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh TERGUGAT I
dan II terhadap penyerahan hasil pekerjaan dan penyerahan barang dan
jasa terhadap belanja pengadaan bak cuci tangan (washtafel)
berdasarkan berita acara sebagai berikut :

- a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :

Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027
/12.R.1.3/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020
beserta lampirannya sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus
Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)"

13. Bahwa, sehubungan dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh
PENGUGAT telah selesai dan dilakukan sesuai dengan dengan tata
cara atau prosedur yang ditentukan oleh Tergugat I dan Tergugat II,
maka dibuatlah kesepakatan atau kontrak yang mengatur tentang
mekanisme pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat sebagai
berikut :

- a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020
Tanggal 28 Desember 2020. PARA TERGUGAT memiliki kewajiban membayar nilai kontrak sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian penggugat telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

14. Bahwa, hingga saat gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember, PARA TERGUGAT belum melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam kontrak (Posita nomor 13), dengan demikian PARA TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji / Wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

15. Bahwa, terhadap pekerjaan Penggugat, terdapat laporan Penyelesaian Pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :

Nomor : 027/12.R.1.5/LPP/35.09.416/2020 tertanggal 28 Desember 2020

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan *"Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah"*. Ketentuan tersebut secara definitif menunjukkan kewajiban Pemerintah *in casu* PARA TERGUGAT untuk bertanggungjawab dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik, salah satunya adalah dengan memenuhi tanggung jawab dan/atau melakukan pembayaran secara utuh dan penuh terhadap Penggugat dalam perkara *a quo*.

16. Bahwa, Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bak Cuci Tangan (washtafel) ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Jember / TERGUGAT III Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember Pasal 19 ayat 1 menyatakan :

“Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.”

Bahwa, terhadap tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).

17. Bahwa faktanya PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan permohonan dari PENGUGAT untuk duduk bersama melakukan mediasi untuk dapatnya dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan Penggugat, namun hingga Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Bahwa, dengan demikian PARA TERGUGAT telah ingkar janji terhadap Penggugat dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1246 KUHPdata, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kerugian Materil yang dialami penggugat sebesar :
- Pembayaran TK Klaster Selatan 50 : Rp. 209.552.500,-
 - Biaya Jasa Advokat : Rp. 10.000.000,-
- Total : Rp. 219.552.500,-
- b. Kerugian Imateril yang dialami oleh penggugat ialah rasa kekecewaan, serta nama baik penggugat tercemar dimasyarakat terkhususnya CV AZKA KARUNIA JAYA yang mengakibatkan tidak mendapatkan proyek dan atau pekerjaan sebagai mana mestinya. Sehingga apabila dinilai yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Apabila digabungkan kerugian materiil dan inmateriil yaitu Rp. 219.552.500,- + Rp. 25.000.000,- = Rp. 244.552.500,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa :

“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dengan demikian, nilai gugatan dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum untuk diajukan, diperiksa dan diputus dalam mekanisme gugatan sederhana.

18. Bahwa, PARA TERGUGAT telah melanggar Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

19. Bahwa, sehubungan dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) maka diajukan permintaan audit terhadap Pengerjaan di lokasi :

- a. Pekerjaan di TK Klaster Selatan 50 :
Berdasarkan surat Permintaan Audit Nomor : 027 /12.R.1.6/BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020, di lokasi Play Group Asy-Syihabiyah, Pos Paud Anggur 16, Pos Paud Anggur 19, Pos Paud Anggur 25, Pos Paud Anggur 29, Pos Paud Anggur 52, Pos Paud Anggur 64, Pos Paud Anggur 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diurai diatas terdapat Yurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama, maka Penggugat mengacu pada Putusan sebagai berikut :

NO	NO PERKARA
1	10/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
2	11/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
3	34/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
4	35/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
5	38/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
6	39/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
7	40/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
8	41/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
9	42/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
10	50/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
11	51/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
12	52/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
13	53/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
14	54/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
15	55/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
16	56/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
17	57/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
18	58/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
19	59/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
20	60/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
21	61/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
22	62/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
23	63/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

NO	NO PERKARA
24	64/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
25	65/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
26	66/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
27	71/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
28	72/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
29	73/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
30	74/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
31	75/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
32	76/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
33	82/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
34	83/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
35	84/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
36	85/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
37	86/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
38	87/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
39	89/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
40	90/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
41	91/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
42	92/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
43	97/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
44	98/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
45	99/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

Semua putusan tersebut telah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), sehingga upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat telah tepat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



dan berlandaskan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

21. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember sebagaimana posita nomor 20, Bupati Jember (Tergugat III) dalam laman web Jemberkab.go.id menyatakan bahwa total keuangan yang harus dibayar oleh Pemkab Jember telah dimasukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 2021, sehingga Pemkab Jember wajib membayar hutang pengadaan wastafel tersebut sebesar Rp 31.000.000.000,- (*tiga puluh satu miliar rupiah*), adapun keuangan yang telah dibayarkan oleh Pemkab Jember sebagai berikut:

1. Rp. 1.483.241.150 pada 2022 kepada 3 rekanan.
2. Rp. 10.826.147.260 pada Kamis 16 Maret 2023 kepada 15 rekanan.

Dengan demikian, total yang telah dibayarkan adalah senilai Rp. 12.309.388.410 (*dua belas miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah*). Oleh sebab itu, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memperjuangkan haknya demi memperoleh kepastian hukum untuk mendapat pelunasan hutang dari Para Tergugat, melalui mekanisme gugatan sederhana dalam perkara *a quo*.

22. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "*kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga*", dengan demikian Para Tergugat wajib untuk menganggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020, selambat-lambatnya gugatan ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.
23. Bahwa guna menjamin Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT adalah wajar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) atas benda bergerak aset milik PARA TERGUGAT guna menjamin kepastian hukum kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa PARA TERGUGAT wajib dan patuh melaksanakan Putusan ini, maka wajar dan patut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai melaksanakan putusan ini.
25. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan otentik, maka gugatan PENGGUGAT telah memenuhi syarat limitatif untuk dikabulkan melalui Putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR jo angka 4 huruf a, f, dan huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvorbaar bij vorrat*) dan Putusan Provisionil ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutus dalam perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adanya hutang PARA TERGUGAT berdasarkan :
 - a. Kontrak Nomor : 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak PENGGUGAT sebesar Rp. 244.552.500,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan kerugian Materiil dan Imateriil.
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk mengangggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020, selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap.
6. Mengukum PARA TERGUGAT tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tiap hari

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Dewatoro S Poetra, S.H., M.Kn., dkk adalah Advokat yang berkantor di TARA Law Office yang beralamat di Jl. Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember-Jawa Timur, Tergugat III hadir Kuasanya Agus Budiarto, S.H., M.H, dkk. Dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 206/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 17 Mei 2023 sedangkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh siapapun untuk mewakili hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor : 04 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dengan pokok gugatan Cidera Janji (Wanprestasi).

Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya*

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat III mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III guna memenuhi perjanjian.

3. Bahwa pada posita angka 2 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang *general contractor* dan *supplier*, yang kemudian legalitas tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Penggugat seharusnya mencermati terlebih dahulu ketentuan yang dijadikan sebagai dasar, apakah ketentuan tersebut masih berlaku ataukah telah diubah atau dicabut oleh ketentuan yang terbit kemudian.

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Bahwa pada posita ke – 18 halaman 9 surat gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka selanjutnya diajukan permintaan audit atas hasil pekerjaan.

Bahwa menyimak kode surat sebagaimana didalilkan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa permintaan audit ditujukan kepada BPKP, dan bukannya ditujukan kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pada lampiran III Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/192.1/1.12/2020 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa Inspektorat selaku APIP melakukan reviu terhadap proses pengadaan barang/jasa. Adapun hasil reviu tersebut ditembuskan kepada Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. Bahwa dengan demikian, surat permintaan audit dimaksud ditujukan kepada pihak yang secara normatif sekedar mendapat tembusan.

5. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print – 888/M.5./ Fd.1 /06/2022 Tanggal 13 Juni dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan kas Dana Bantuan Tidak Tetap (BTT) Covid-19 pada Kabupaten Jember, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bendahara BTT Covid-19 pada Kantor BPBD Kabupaten Jember pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kira nya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Pengugat.
6. Bahwa Unit III Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terhadap PPK, bendahara dan pihak-pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan bak cuci tangan (wastafel) yang menggunakan anggaran BTT Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember, oleh karenanya terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat patut kira nya untuk ditolak menunggu selesainya pemeriksaan aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan diatas untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara akibat pembayaran kepada Penggugat.
7. Bahwa, Tergugat III menyatakan menolak serta menyangkal argumentasi Penggugat dalam dalil gugatan selebihnya dan juga menolak serta menyangkal tuntutan selebihnya, yang ternyata bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat III yang ternyata juga bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya.
8. Bahwa, terhadap dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat III, secara tegas Tergugat III menolaknya, karena tidak ada relevansi dan urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *a quo* nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat III bukan merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam materi gugatannya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian CV (*Commanditaire Vennootschap*) Akta Perubahan Nomor 07 tanggal 4 April 2022, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.N. BOY SAMPURNO, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Nota Dinas, Menunjuk keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/394.1/1.12/2020 tertanggal 18 Juni 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Perintah Melaksana kan Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: 027/08.R.5/SPMPBJ/35.09.416/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/08.R.6/SPPBJ/35.09.416/VII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1769.G/SP/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Kerjaan (SPMK) Nomor : 027/1769.G.1/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.R.23/ADD-SP.A /35.09.416/XII/2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-8);
 9. Fotokopi Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (ADD - SPMK) Nomor : 027/12.R.24/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-9);
 10. Fotokopi Addendum Surat Pesanan (ADD-SP) Nomor : 027/12.R.25/ADD-SP/35.09.416/XII/2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-10);
 11. Fotokopi Addendum Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.R.1.1/ADD-SPMK /35.09.416/XII/2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-11);
 12. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Bersama (BAPB) Nomor : 027/12.R.22/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-12);
 13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 027/12.R.1.2/BAST /35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-13);
 14. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/12.R.1.3/BAPHP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-14);
 15. Fotokopi Kontrak Nomor : 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-15);
 16. Fotokopi Laporan Penyelesaian Pekerjaan (LPP) Nomor : 027/12.R.1.5/LPP/35.09.416/2020 tertanggal 28 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-16);
 17. Fotokopi Surat Permintaan Audit Nomor : 027/12.R.1.6/BPKP/35.09.416/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai copy dari fotocopy diberi tanda (bukti P-17);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Jember tanggal 27 Maret 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan copy dari fotocopy diberi tanda (bukti T.III -1);
2. Fotokopi Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12 /2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 03 April 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti T. III -2);
3. Fotokopi Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12 /2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan copy dari fotocopy diberi tanda (bukti T.III -3);
4. Fotokopi Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/445/1.12/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Desease 19 (Covid -19) Tahun 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti T.III -4);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat III menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV. AZKA KARUNIA JAYA yang bergerak dibidang penyedia Jasa Kontruksi ;
- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat telah mendapatkan proyek pengerjaan dari Tergugat melalui PPK BPBD (Tergugat II) ;
- Bahwa proyek tersebut adalah pengerjaan wastafel pada sekolah-Sekolah di Kabupaten Jember ;
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek yang diberikan oleh Tergugat tersebut dan telah menyerahkan pengerjaan pekerjaan tersebut kepada Tergugat melalui PPK ;
- Bahwa setelah hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan dan diterima oleh PPK, Tergugat tidak membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa setelah serah terima barang PPK wajib membayar hasil pekerjaan yang telah dilakukan penghitungan bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan ,

1. apakah benar Tergugat telah memberikan pekerjaan kepada Penggugat ;
2. Apakah Penggugat telah mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut ;
3. Apakah proyek pekerjaan tersebut telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat ;
4. Apakah hasil pekerjaan Penggugat tersebut telah dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Fotokopi Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 27 Maret 2020, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lapidan I Keputusan Bupati Jember No. 188.45/178/1.12/2020 tanggal 27 Meret 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disease 2019 (Covid-19) (Bukti (T.III - 1) pada BAB IV huruf (a) dan (b) berbunyi :

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- b. Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasakan (bukti T.III -3) yaitu Penetapan Bupati Jember :

- Nomor: 188.45/192.2/1.12/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Teknis Pendukung Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020 (Bukti T.III -3) ;
- Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/445/1.12/2021, perubahan ke 5 (lima) yaitu Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/164.2/1.12/2021 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran dan pengurus Barang Persediaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Corona Virus Desease 19 (Covid -19) Tahun 2021 (Bukti T.III -4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1./1.12/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) (Bukti T.III - 2) pada angka 2, 3, 4 menyebutkan :

2. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa ada keterkaitan antara Bupati, Kepala BPBD (selaku KPA) dan PPK yaitu :

- Bupati menetapkan Pejabat PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen:

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P- 7), diperoleh fakta bahwa pihak PPK telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Kerjaan (SPMK) Nomor : 027/1769.G.1/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah di addendum dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.R.24/ADD-SPMK.A/35.09.416/XI/2020 tanggal 28 Desember 2020 (Bukti P-9), yang telah di addendum dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.R.1.1/ADD-SPMK /35.09.416/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 (Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa atas hasil pekerjaan Penggugat telah dilakukan Penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 027/12.R.22/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-12) dan telah dilakukan serah terima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/12.R.1.2/BAST /35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I Serta Tergugat II dan Tergugat III belum membayar kepada Penggugat atas hasil pekerjaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 yang memohon agar dinyatakan secara hukum perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah secara hukum, dan karenanya mengikat bagi Penggugat dan Tergugat adanya hutang Tergugat berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya“ ;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “ :

- Kesepakatan antara kedua belah pihak ;
- Kecakapan dalam membuat suatu perikatan ;
- Suatu pokok persoalan tertentu ;
- Suatu sebab yang halal/ tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kontrak sesuai dengan Kontrak Nomor: 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 (Bukti P-15) sesuai dengan SPMK Nomor : 027/1769.G.1/SPMK/35.09.416/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 (Bukti P-7) yang telah di addendum I dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.R.24/ADD-SPMK.A/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 (Bukti P-9) yang telah di addendum II dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Melaksanakan Kerja (ADD-SPMK) Nomor : 027/12.R.1.1/ADD-SPMK/35.09.416/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa kontrak tersebut telah dibuat dan disepakati oleh PPK (Tergugat II) sebagai kepanjangan tangan dari Tergugat dengan Penggugat (Direktur CV. AZKA KARUNIA JAYA) yaitu oleh pihak yang mempunyai kompeten dalam pembuatan kontrak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak dibuat oleh pihak yang berkompoten dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 maka kontrak (kesepakatan) tersebut adalah sah dan mengikat bagi para pihaknya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 244.552.500,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan kerugian Materiil dan Imateriil dari Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengerjaan wastafel yang telah dikerjakan oleh Penggugat setelah dilakukan penghitungan bersama sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Bersama Nomor : 27/12.R.22/BAPB/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 (Bukti P-12) selanjutnya di lakukan penyerahan pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor : Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 027/12.R.1.2/BAST/35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Penggugat senilai Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) (Bukti P-13) tidak dilakukan pembayaran oleh pihak PPK (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa nilai tersebut adalah nilai kerugian materiil senilai Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang diderita oleh Penggugat atas pengerjaan proyek tersebut, sehingga tuntutan Penggugat yang menuntut pembayaran atas pengerjaan proyek tersebut dapat dikabulkan dengan nilai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 027/12.R.1.2/BAST /35.09.416/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 beserta lampirannya sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa total pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan ganti kerugian Immateriil yang dituntut oleh Penggugat karena dalam Posita gugatan Penggugat tidak memperinci kerugian immateriil yang bagaimana yang diderita oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian secara Immateriil tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya pembayaran oleh pihak PPK sebagai kepanjangan KPA (Kepala BPBD) kepada Penggugat selaku penyedia Jasa pekerjaan proyek pengerjaan wastafel tersebut maka PPK (kepanjangan dari Kepala BPBD) selaku KPA sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Bupati (Tergugat III) dapat dinyatakan telah melakukan Cedera Janji (Wan Prestasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat III yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan somasi/peringatan sehingga tidak pernah terdapat pernyataan lalai dari Penggugat kepada Para Tergugat mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat guna memenuhi perjanjian, sehingga Para Tergugat belum bisa dikatakan wan prestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena persetujuan atau perjanjian itu telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak wajib untuk memenuhi isi perjanjian tersebut tanpa harus di berikan peringatan/ teguran dari pihak satunya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil sangkalan Tergugat III haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membayar kepada Penggugat bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (dwangsom) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membayar sejumlah uang dan gugatan tersebut dikabulkan, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 611a Rv yang sama rumusan ketentuannya dengan Pasal 606a Rv (Vide Putusan Mahkamah Agung No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009) tuntutan mengenai uang paksa (Dwangsom) tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 7 ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah menentukan siapa saja yang akan dikenakan beban untuk menanggung kerugian dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III adalah pihak yang ada keterkaitan sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas yaitu :

- Bupati (Tergugat III) menetapkan Pejabat PPK (Tergugat II) dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tergugat selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) yang ditunjuk secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Desesase 2019 (Covid-19) adalah Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ,Kepala BPBD selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengantisipasi dan menangani dampak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya PPK (Tergugat II) menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan B/J di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.

4. Pejabat Pembuat Komitmen:

- a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui penyedia.
- b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran deapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin/sekaligus) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa antara Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III adalah mempunyai andil dalam pengerjaan proyek Wastafel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Petitum Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat, Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dipihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah secara hukum, hutang Tergugat berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas hak-hak Penggugat sebesar Rp. 209.552.500,- (Dua ratus Sembilan juta lima ratus lima puluh dua ratus rupiah)

5. Mewajibkan Para Tergugat untuk mengangggarkan dan membayar keuangan sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/12.R.1.4/KONTRAK/35.09.416/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020, selambat-lambatnya ketika sederhana ini sudah terdapat putusan yang *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap;
6. Mengukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III tunduk dan patuh pada putusan ini ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini tanggung renteng sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diteputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tanggal 2 Mei 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahwar, S.H.

Totok Yanuarto, S.H, M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	36.000,00
4. PNBP	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2023/PN Jmr